

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Fuady, M. (2002). *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
3. Hartono, S. R. (2000). *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju.
4. Kansil, C.T (1995). *Hukum perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
5. Kelsen, H. (2008). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia.
6. Khairandy, R. (2000). *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
7. Prasetya, R. (1996). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
8. Sulistiowati. (2010). *Aspek Yuridis dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup*. Jakarta: Erlangga.
9. Widjaya, G. (2008). *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.
10. Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.
11. Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, Hal. 38.
12. Virgayani Fattah, 2017, *Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan*, Surabaya, *Jurnal Yuridika : Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Hal. 357.
13. Selfi Udeng, Tenry Muslinda, Andi Dio Batari, Nurfebryanti, Puspa Indah Lestari, 2018, *Efisiensi Penerapan Sistem Hukum di Indonesia*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Hal. 2.

14. Muhammad Junaidi, 2016, Semangat Pembaharuan dan Penegakan Hukum Indonesia Dalam Perspektif *Sociological Jurisprudence*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang, Hal 48.

B. Skripsi dan Jurnal

1. Larasati, V. (2018). Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Terhadap Pihak Ketiga Akibat Transaksi Untuk Kepentingan Perseroan Sebelum Berstatus Badan Hukum. Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia.
2. Triwulan, T., & Shinta. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.
3. Widjaya, I. R. (2003). Hukum Perusahaan. Jakarta: Mega Poin.
4. Fikriya, T. N. (2020). Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara. *Lex Renaissance*, 598.
5. Kurniawan. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Mimbar Hukum*, 25-81.
6. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
7. Putri, K. D., & Arifin, R. (2018). Tinjauan Teoritis dan Kepastian DalDalam Hukum di Indonesia. *Mimbar Yustisia*, 150.
8. Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 285.
9. Sinaga, E. J. (2017). Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan KemudahanBerusaha di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 330.
10. Sulistiowati, & Antoni, V. (2013). Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia. *Yustisial*, 25-26.
11. Tumanggor, P. S. (2015). Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: PerspektifTanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas. *Nuansa Kenotariatan*, 46-47.
12. Wardhana, G. P. (2019). Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia. *Arena Hukum*, 1.

13. Wardhana, G. P. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Indikator Alter Ego Dalam Penerapan Doktrin PCV di Indonesia. *Refleksi Hukum*, 20-21.

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas WebsiteNov. (2022, Maret 20). 9 Perusahaan Ini Jadi Tempat Investasi Uang Hasil Korupsi Nazaruddin. Retrieved from
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseoran Terbatas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1999 tentang Bentuk- Bentuk Tagihan yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.
6. <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-perusahaan-ini-jadi-tempat-investasi-uang-hasil-korupsi-nazaruddin->
7. <https://www.hukumonline.com>
8. Prof Jamin Ginting dalam Hukumonline Executive Training 2024 hari kedua bertajuk “Profesionalisme Kerja dan Pengambilan Keputusan Komisaris, Direktur dan Eksekutif Perusahaan”, Kamis (27/6/2024) di Jakarta.